

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi dunia usaha maupun lembaga yang bergerak pada pelayanan masyarakat, seperti lembaga-lembaga pemerintah, rencana keuangan selama periode yang ditentukan atau biasa disebut sebagai anggaran adalah sesuatu yang harus ditetapkan pada awal periode lembaga tersebut berjalan. Definisi dari anggaran sendiri adalah rencana keuangan tersistem yang harus ditetapkan suatu lembaga pada periode yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri. Peran penting anggaran tercermin antara lain dalam fungsi anggaran itu sendiri, yaitu alat yang memungkinkan manajemen untuk mengelola fungsi melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan sebagai pedoman pelaksanaan bagi perusahaan agar dapat mengendalikan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Indrawati, 2021).

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial adalah bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada didalam daerah wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi (Handayani, 2018).

Kinerja manajerial yang baik sangat penting dalam sektor publik karena dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan adanya manajer yang kompeten dan berkinerja tinggi, sektor publik dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Pratiwi & Kartika, 2019).

Performa atau kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan di berbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk selalu tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara jujur dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah No. 8 (2006) tentang kinerja instansi pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari program yang hendak atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Performa manajerial merupakan gambaran untuk tujuan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan kerjasama yang kuat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karena, semakin baik kinerja seorang manajer akan berpengaruh dengan semakin baiknya organisasi tersebut.

Perubahan sektor publik yang dilengkapi dengan demokrasi permintaan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia, permintaan ini menyebabkan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Penerbitan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mendorong terjadinya desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, desentralisasi menandakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri. Desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan permintaan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan yang teratur, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran.

Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dibuat berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses penentuan setiap manajer dalam melaksanakan program. Penyusunan anggaran seringkali didominasi oleh tugas-tugas teknis, sehingga manajer yang menyusun anggaran harus hidup dengan anggaran tersebut (Nurhafid, 2017).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keterlibatan manajer operasi dalam keputusan bersama dengan komite anggaran tentang rangkaian kegiatan di masa depan yang akan dilaksanakan oleh operasi manajer untuk mencapai sasaran anggaran. Tingkat partisipasi manajer operasi dalam penyusunan kesepakatan akan meningkatkan moral kerja dan inisiatif para manajer. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya, atasan, dan rekan kerjanya (Fitrika, 2018).

Untuk sukses menyusun anggaran, manajer harus terlibat dalam pengendalian biaya dan membuat proyeksi anggaran mereka sendiri. Artinya, anggaran tidak bisa ditentukan secara sepihak. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran juga sangat penting terutama jika anggaran tersebut digunakan untuk menganalisis dan menilai kinerja manajer. Hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan, bukan kerja sama atau peningkatan produktivitas (Juwita, 2018).

Metode penganggaran yang memungkinkan manajer menyusun estimasi anggaran disebut kesepakatan kesepakatan yang disetujui secara mandiri. Self-imposed budget atau kendali diri adalah kendali yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi penuh dari manajer dan seluruh tingkatan. Estimasi yang dibuat oleh manajer tingkat bawah tidak dapat diterima begitu saja oleh manajer tingkat atas. Jika tidak ada sistem pemeriksaandan pengecekan, batasan anggaran mungkin menjadi lunak atau mengandung banyak kelonggaran anggaran, yang mengakibatkan ketidakefisienan dan pemborosan. Oleh karena itu, sebelum kesepakatan disetujui, kesepakatan harus ditinjau secara cermat oleh atasan langsung (Marwan, 2014).

Seluruh tingkatan organisasi harus berkolaborasi untuk merumuskan kesepakatan karena manajer puncak umumnya kurang mengetahui hal-hal secara detail dan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari bawahan mereka. Namun, manajer puncak memiliki sudut pandang yang lebih luas terhadap perusahaan secara keseluruhan dan sangat penting dalam membuat kebijakan anggaran secara keseluruhan. Setiap tingkat tanggung jawab dalam organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam sistem partisipasi penyusunan anggaran yang terintegrasi (Mahanani, 2019).

Manfaat penganggaran termasuk merencanakan struktur organisasi atau akuntabilitas dalam jangka pendek. Akuntansi akuntabilitas adalah jenis akuntansi yang dirancang khusus untuk mengevaluasi kinerja manajer. Tanggung jawab manajer mencakup pendapatan, biaya, laba, dan investasi, dan laporan kinerja, setiap tanggung jawab diukur berdasarkan anggarannya. Dengan demikian, kinerja manajer di setiap pusat akuntabilitas dapat ditentukan. Kinerja manajer diukur berdasarkan kemampuannya untuk mengelola pusat akuntabilitas dengan baik (Nurhafid, 2017).

Fenomena masalah yang ditemukan di Pemerintahan Kota Bandar Lampung ialah kinerja pegawai yang belum maksimal. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah masih maraknya tindak pungutan liar (pungli) yang terjadi di satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang sekarang kita kenal dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melayani masyarakat dalam hal perizinan (sumber lampost.com) Kinerja manajemen yang dirasa masih kurang baik dikarenakan kurangnya kesadaran dari dalam diri para pegawai untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masih banyak pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja yang dilakukan oleh para pegawai disaat hari pertama masuk kerja setelah libur panjang, seperti libur hari raya ataupun libur bersama lainnya. Tindakan ini akan membuat kinerja dalam pemerintahan menjadi tidak maksimal dan tujuan dari organisasi belum tercapai karena para pegawai yang tidak hadir. (sumber kupastuntas.com)

Kepala Ombudsman Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf menyoroti kepala Dinas yang menjabat pelaksana tugas (plt) di Pemkot Bandarlampung. "Apa tidak ada lagi orang pintar di lingkungan mereka bekerja," tanyanya. Mereka yang merangkap jabatan adalah: 1. Kepala Disdukcapil Febriana merangkap jabatan sebagai Plt Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). 2. Kepala Satuan Pol PP Kota Bandarlampung Ahmad Nurizki Erwandi merangkap sebagai Plt Kabag Protokol. Mereka yang masih plt :

1. Plt Dinas Kominfo Andi.
2. Plt Dinas Kesehatan Desti Megaputri.
3. Plt Dinas PPPA Maryamah.
4. Plt Dinas Sosial Aklim Suhadi.
5. Plt Dinas Perumahan dan Pemukiman Yusnadi Ferianto.
6. Plt Dinas Perpustakaan M. Yusuf.

Dalam konteks pengangkatan jabatan, memang hak prerogatif Wali Kota, apakah dengan dua jabatan itu bisa melayani masyarakat dengan optimal? tanyanya kepada Poskota Lampung, Kamis (26/1/2023). Menurut Kepala Ombudsman Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, rangkap jabatan maka harus membagi waktu untuk mengurus dua instansi yang dipegangnya apakah nantinya dapat bekerja secara maksimal. Apalagi era sekarang ini rangkap jabatan dapat menghambat kinerja kepala Dinas tersebut apakah tidak ada lagi orang pintar di lingkungan mereka bekerja, katanya. Lebih lanjut, Nur Rakhman Yusuf menambahkan ini akan menjadi persoalan baru jika ada dua jabatan yang dipegang satu orang. Dicontohkannya, masyarakat butuh ke pelayanan publik dan membutuhkan tanda tangan kepala dinas, tapi saat dibutuhkan tidak ada kepala dinas karena harus menjadi plt di Dinas lainnya. Lebih lanjut, Nur Rakhman Yusuf menambahkan, seharusnya jabatan yang strategis di Pemkot Bandarlampung bisa diberikan kepada orang yang berkompeten. Apalagi, plt tidak bisa mengeluarkan kebijakan, misalkan untuk masalah anggaran atau memindahkan pegawai, tapi kalau definitif jelas kebijakannya melekat, tuturnya. Sumber: (https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedi_-ombudsman soroti-plt-dan- rangkap-jabatan-pemkot-bandar lampung).

Kinerja manajerial di Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dirasa memiliki kinerja yang belum cukup baik. Salah satu faktor yang membuat kinerja manajerial di Pemerintahan Kota Bandar Lampung belum optimal adalah partisipasi anggaran. Menurut Wulandari (2013), partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki dampak positif terhadap kinerja manajerial. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, semakin tinggi pula tingkat kinerja aparat pemerintah. Namun, dalam studi yang dilakukan oleh Ermawati (2017), partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh pada kinerja manajerial. Ini menandakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak mempengaruhi tingkat kinerja manajerial. Partisipasi anggaran dalam kinerja manajerial merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih, dimana keputusan tersebut memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Oleh karena itu, partisipasi yang baik adalah yang melibatkan atasan dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi semu. Partisipasi anggaran bertujuan agar anggaran yang ditetapkan bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Proses penyusunan anggaran memerlukan kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan yang disusun secara partisipatif dan disahkan oleh para manajer dari setiap divisi dan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Manajer puncak menciptakan berbagai divisi tanggung jawab atau dikenal dengan pusat pertanggungjawaban.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan aset, biaya, dan pendapatan secara tepat sesuai dengan bidang pertanggungjawaban di dalam organisasi (Retnani, 2015). Mulyadi (2018) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kegiatan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian (Hanoum, 2019), akuntansi pertanggungjawaban memiliki dampak positif pada kinerja manajerial. Menurut riset (Wulandari, 2013), kesetiaan perusahaan memengaruhi kinerja manajemen secara positif. Semakin kuat kesetiaan perusahaan yang dimiliki oleh individu, maka kinerjanya akan semakin

meningkat. Namun, dalam penelitian (Andina, 2013) kesetiaan perusahaan berdampak buruk pada kinerja manajemen. Riset ini menunjukkan bahwa kesetiaan perusahaan yang baik tidak akan mempengaruhi kinerja tanpa dibarengi dengan keterampilan dan keahlian manajerial.

Agar kinerja manajerial dapat meningkat maka diperlukan kerjasama dan komitmen seorang individu pada suatu organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan suatu keyakinan, dorongan serta dukungan kuat terhadap nilai dan sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tujuan. Komitmen yang tinggi ditandai dengan bentuk loyalitas dan identifikasi diri individu terhadap organisasinya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari, 2013) menyatakan bahwa loyalitas organisasi berdampak positif pada kinerja manajemen. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara loyalitas organisasi dan kinerja aparat pemerintah daerah sejalan. Semakin tinggi tingkat loyalitas organisasi pada setiap individu atau aparat pemerintah daerah, semakin baik pula kinerjanya. Namun, menurut penelitian (Andina, 2013), loyalitas organisasi tidak memiliki dampak pada kinerja manajemen. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesetiaan meningkat, keterampilan dan keahlian manajemen tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja manajerial.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sutandi, 2019) dengan judul pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Sidoarjo. Pada penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Sidoarjo.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel yaitu komitmen organisasi. Penambahan variabel komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi

merujuk pada tingkat keterikatan, loyalitas, dan dedikasi seorang individu terhadap organisasi tempatnya bekerja. Ini mencakup identifikasi dengan nilai-nilai organisasi, kepuasan kerja, niat tinggal, dan keinginan untuk berkontribusi secara maksimal. Adanya komitmen organisasi yang tinggi pada tingkat manajerial dapat memiliki dampak positif pada kinerja mereka. Objek penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya (Sutandi, 2019) dilakukan di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Sidoarjo Dan Peneliti Dilakukan Pada Tahun 2019.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Komitmen Organisasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah partisipasi anggaran, akuntansi pertanggung jawaban dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntansi pertanggung jawaban terhadap kinerja manajerial.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan komitmen organisasi dalam hubungannya dengan kinerja manajerial. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti grand theory, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN